




PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Telp./Fax. (0338) 672323 / 673900
SITUBONDO 68312

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENATAUSAHAAN PNB**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/26
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua



Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.
NIP 19660301 199203 1 004

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Situbondo
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Situbondo*



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Telp./Fax. (0338) 672323 / 673900
SITUBONDO - 68312

Nomor SOP	: SOP/AS/26
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua PA. Situbondo

SOP PENATAUSAHAAN PNBP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2 PP No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 3 PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 4 PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN 5 PMK No. 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 6 Pedirjen No. 3 Tahun 2014 pasal 10 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 7 SE SEKMA No. 21B/SEK/KU.04.2/01/2017 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 8 Persekma No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 9 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Situbondo Nomor : W13-A19/0159/HK.08/1/2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2018 10 SNI ISO 9001:2015 Klausul 7.1.1 11 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama	1, S1 Sederajat; 2, SMA Sederajat;

Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan
SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28)	Peralatan Komputer, Kertas, printer, alat tulis, Peraturan serta Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Arsip Keuangan Dan Keuangan FM/AS/26/01, FM/AS/26/02, FM/AS/26/03

No.	Aktivitas	Staf / Bendahara	Kasubag Umum dan Keuangan	KPA/ Kepala Satker	Mutu Baku		
					Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penunjukan Bendahara Penerima				Draf SK Bendahara Penerima	1 hari	SK Bendahara Penerima
2	Bendahara penerimaan menerima setoran PNBP dan menata usahakan				SK Bendahara Penerima, Menerima bukti setoran dari kasir	15 Menit	Bukti tanda terima, mencatat dalam buku BKU Bendahara Penerimaan
3	Menginput PNBP ke dalam aplikasi simphoni dan mencetak kode billing setoran PNBP				Bukti tanda terima, BKU, aplikasi SIMPHONI	15 Menit	Bukti Setor Billing (FM/AS/27/01)
4	Menyetorkan PNBP ke Kas Negara melalui Bank Persepsi				Bukti billing	60 menit	Bukti setoran bank
5	Membukukan setoran PNBP yang sudah mendapatkan NTPN ke dalam aplikasi SIMARI dan aplikasi SAS				Bukti setoran bank, aplikasi SIMARI, aplikasi SAS	20 Menit	Update data SIMARI dan SAS
6	Mencetak laporan PNBP dalam Aplikasi SIMARI dan mencetak LPJ bendahara penerimaan serta BKU bendahara penerimaan dari aplikasi SAS				Update data SIMARI dan SAS, LPJ Bendahara Penerimaan (FM/AS/27/02), BKU Bendahara Penerimaan (FM/AS/27/03)	20 Menit	LPJ Bendahara Penerimaan, BKU Bendahara Penerimaan
7	Penandatanganan laporan PNBP dan LPJ Bendahara Penerima				Laporan LPJ Penerimaan, BKU Bendahara Penerimaan	20 Menit	LPJ Penerimaan yg telah ditandatangani
8	Melakukan Rekonsiliasi LPJ Bendahara Penerimaan ke KPPN Bondowoso				LPJ Penerimaan yg telah ditandatangani, rekening koran	30 Menit	Berita Acara rekonsiliasi KPPN, Laporan PNBP , tanda terima dari KPPN, arsip